

**PERSPEKTIF EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MENGENAI PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA,
TINGKAT KEMISKINAN, DAN BELANJA MODAL
TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI JAWA BARAT
TAHUN 2002-2021**

Puloh¹, Marcelino Faiz², Muhamad Rifai³, Hani Cahyani Putri⁴

^{1, 2, 3, 4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹puloh@febi-inais.ac.id, ²marcelinofaiz43@gmail.com, ³mr0847294@gmail.com,

⁴cahyaniputrifarmasi136@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to show the impact of the Human Development Index, poverty, capital expenditure on the level of open response in West Java Province in 2002-2021. Data collection uses secondary data on the Human Development Index, poverty rate and spending capital in West Java Province obtained from the Badan Pusat Statistik in the form of time series data from 2002 to 2021. The analytical method used in this study is the multiple regression analysis method which consists of more than one independent variable, processed using the SPSS 26 application, produces a regression equation for $IPM = - 0.019; MSK = 0.793; BM = - 0.034$. The results of this study indicate that the IPM variable has a significant negative effect on the level of open stimulation. While the Capital Expenditure variable has a negative and insignificant effect on the level of open response.

Keywords: Human Development Index, Poverty Rate, Capital Expenditures, West Java Open Unemployment Rate.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan dampak Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan, belanja modal terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2021. Akumulasi data menggunakan data sekunder Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan dan belanja modal di Provinsi Jawa Barat yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa data *time series* tahun 2002 sampai dengan tahun 2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda yang terdiri dari lebih dari satu variabel independen, diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 26, menghasilkan persamaan regresi untuk $IPM = - 0,019$; $MSK = 0,793$; $BM = - 0,034$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan

variabel belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Kata-kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Belanja Modal, Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat.

I. PENDAHULUAN.

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meraih kemajuan sosial. Dengan meraih kemajuan sosial, masyarakat membutuhkan kesempatan kerja, yang pada akhirnya berdampak pada pemerataan pendapatan penduduk. Di sisi lain, kesenjangan antara kesempatan kerja dan angkatan kerja menyebabkan peningkatan kesempatan kerja dan pencari kerja yang tidak seimbang, yang berdampak negatif pada pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja, sedang mencari kerja namun belum menemukan pekerjaan.

Dan diantara penyebab terjadinya pengangguran kurangnya lapangan pekerjaan yang ada akibatnya tidak seimbang jumlah pencari kerja di suatu daerah sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Karena pengangguran di Jawa Barat merupakan masalah yang harus cepat diatasi demi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi ialah salah satu usaha perubahan tersusun yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat serta penciptaan lapangan kerja, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat disuatu daerah. Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensi yang mana hal ini melibatkan perubahan fundamental dalam struktur atau aspek sosial, sikap, dan lembaga negara, sambil terus mengupayakan percepatan pertumbuhan

ekonomi, mengatasi ketimpangan wilayah, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran (Todaro, 2003).

Indonesia salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia turut memiliki potensi pasar yang cukup besar dalam hal input tenaga kerja. Disamping permintaan sangat yang tinggi, populasi yang besar mendorong pasar dari perspektif permintaan. Sebagai sumber tenaga kerja, jumlah penduduk yang besar dapat menggerakkan perekonomian dari sisi penawaran. Namun, jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan lowongan kerja, maka ini jelas akan menimbulkan masalah khususnya masalah ketenagakerjaan, seperti tingginya angka pengangguran, yang akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kemiskinan, kejahatan, dan kejadian sosial ekonomi di masyarakat tersebut (Wahyuni, 2005).

Menurut Alghifari, pada tahun 2010 pengangguran ini terjadi sebab tingkat perputaran tenaga kerja yang besar tak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta tingkat penyerapan tenaga kerja yang sangat kecil. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2016), pengangguran terbuka mereka yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan diri untuk membuka usaha, dan mereka tidak

mencari pekerjaan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, serta mereka yang telah menemukan pekerjaan. Orang yang telah menemukan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Wahyuni (2005), pertumbuhan penduduk yang tinggi turut menjadi faktor penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia. Pada dasarnya pertumbuhan penduduk memiliki dua aspek yang berbeda. Pertama Jumlah penduduk yang besar merupakan senjata tajam untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, namun disisi lain jika tidak diatur dengan baik maka jumlah penduduk yang besar menimbulkan masalah kependudukan yang sangat kritis khususnya di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan, mereka tidak akan mampu menyerap lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Indeks Pembangunan Manusia.

Saputra, Marhoji, dan Nurkhasanah, 2019: 56 menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah angka yang mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen mendasar dari kualitas hidup yang mempengaruhi tingkat produktivitas seseorang berumur panjang dan hidup sehat, dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk menciptakan peluang menerapkan kemampuannya pada kegiatan produktif dan meningkatkan taraf hidupnya,

merupakan tujuan pembangunan manusia (Bappenas, 2019).

Pembangunan manusia kini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan secara serius. Hal ini karena manusia merupakan aset penting suatu negara. Indikator peningkatan kualitas manusia ini pun dapat digunakan untuk menilai tingkat perkembangan manusia, serta dampak kondisi fisik dan non-fisik (kecerdasan) pada bentuk kesehatan dan kemakmuran.

Penilaian ini dapat dicerminkan dari tingkat harapan hidup dan keterjangkauan hidup seseorang, dan dapat ditelaah dari tingkat pendidikan yang diberikan oleh masyarakat, selain dari ukuran non fisik. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia di seluruh dunia mencakup sebagian pertimbangan harapan hidup atau dapat disingkat AHH, angka melek huruf disingkat AMH, dan standar hidup (Lamatenggo, 2019).

II.2. Kemiskinan.

Menurut Machmud (2016), kemiskinan merupakan keadaan dimana ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang dimilikinya, termasuk kecukupan hidup sehari hari kecukupan pangan, sandang, papan, serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang diinginkan. Kemiskinan merupakan keadaan di mana seseorang kehilangan manfaat. Suatu keadaan dimana keluarga atau seseorang berada dalam keadaan sulit untuk memenuhi kebutuhan inti kehidupan dan lingkungannya tidak berbagi peluang yang dirancang untuk meningkatkan kemakmuran atau melarikan diri dari keadaan ini disebut kemiskinan.

Bappenas (2018) mendefinisikan kemiskinan sebagai personal atau kelompok,

termasuk laki-laki dan perempuan, yang sedang mengalami kesulitan dan ketidaksadaran dalam mewujudkan hak dasarnya untuk hidup sehingga tidak dapat mempertahankan dan berkembang secara bermartabat. Hak inti yang harus dimiliki seseorang termasuk kebutuhan akan makanan, kesehatan yang baik, pendidikan, pendapatan kerja, rumah, air bersih, tanah tempat tinggal, sumber daya alam yang subur, kehidupan yang aman di lingkungannya dan kebebasan dari bahaya kekerasan, dan kebebasan untuk menjalani kehidupan sosial dan politik. Proporsi penduduk yang kondisi hidupnya ada di belanja garis kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai standar hidup minimum yang ditentukan dapat disebut dengan angka kemiskinan.

II.3. Belanja Modal.

Belanja modal ialah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli atau menambah nilai aset dan/atau aset lainnya yang memberikan penghasilan selama lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi modal minimum Aset Tetap/aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Aset tetap /aset lainnya yang digunakan atau diperuntukan bagi kegiatan usaha unit kerja atau penggunaan masyarakat/masyarakat, dicatat sebagai aset kementerian/lembaga terkait dan tidak dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda. Saat memperhitungkan nilai perolehan suatu aset, hitung semua dana yang diperlukan hingga aset tersebut tersedia dan siap digunakan.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan komoditas/aset merupakan tahap validasi untuk menentukan belanja modal atau tidak, dan merupakan

persyaratan wajib untuk menentukan kapitalisasi pengadaan komoditas/aset:

1. Pengeluaran anggaran belanja menghasilkan peningkatan aset dan/atau jasa hidup / ekonomi Peningkatan aset yang berhubungan dengan kehidupan. Pengeluaran anggaran ini menghasilkan peningkatan kapasitas, standar kinerja, atau volume aset.
2. Memenuhi nilai kapitalisasi minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Kelolaan Barang Milik Negara (BMN).
3. Pengadaan barang tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada selain masyarakat/pemerintah daerah/pemerintah pusat.

II.4. Tingkat Pengangguran.

Mankiw (2018), menyatakan bahwa pengangguran adalah seseorang yang sedang menunggu panggilan kerja di tempat beliau dulu bekerja namun dipecat disebut jua menganggur. Pengangguran mempunyai kategori yang meliputi orang yang menganggur, mampu bekerja tetapi mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan pada waktu 4 (empat) minggu.

Pengangguran adalah situasi dimana angkatan kerja sangat ingin mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukannya. Ini mungkin sebab jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar ketika itu lebih besar dari yang dibutuhkan. Pengangguran terbuka mengacu pada orang yang terdaftar sebagai pengangguran, sedang mencari pekerjaan, belum bekerja namun telah menemukan pekerjaan dan keadaan orang yang sedang memulai perjuangan tetapi tak memiliki pekerjaan tingkat pengangguran terbuka

yang didefinisikan oleh Badan Sentra Statistik adalah perbandingan antara jumlah pengangguran di suatu wilayah dengan jumlah angkatan kerja pada daerah tersebut.

II.5. Perspektif Ekonomi dan Bisnis Islam.

Ekonomi dan Bisnis Islam tentunya berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. Diantara prinsip pokok Ekonomi dan Bisnis Islam berdasarkan Al Qur'an dan Hadits adalah (Adiwarman Azwar Karim, 2019):

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.
2. Manusia adalah Khalifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya.
4. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
5. Eksploitasi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan.
6. Menerapkan sistem warisan Islam (*Mawârits/Farâidl*) sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu.
7. Menerapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu.

Dengan berdasarkan hal tersebut di atas, perspektif dihasilkan dan ditujukan kepada berbagai hal yang berhubungan

dengan ekonomi dan bisnis. Perspektif tersebut disebut juga dengan Perspektif Ekonomi dan Bisnis Islam.

III. METODE PENELITIAN.

III.1. Jenis dan Sumber Data.

Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berasal indeks pembangunan manusia, Kemiskinan, serta belanja modal yang terdapat pada Provinsi Jawa Barat yang diperoleh Badan pusat Statistik, berupa data *time series* dari tahun 2002-2021.

III.2. Metode Analisis.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis regresi berganda yang terdiri lebih dari satu variabel independen. Bentuk umum dari regresi berganda ditulis sebagai berikut :

$$Y = C + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependent

C = Konstanta

$\beta_1 X_1 \quad \beta_2 X_2 \quad \beta_3 X_3 =$ Variabel Independent atau parameter dari $X_1, X_2, X_3,$

e = Standar error.

Penggunaan alat analisis ini dengan maksud untuk menganalisis bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan belanja modal terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.

III.3. Uji t Statistik.

Uji-t adalah menguji koefisien regresi secara individual untuk mengetahui pengaruh

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan variabel lain tetap atau tidak berubah. Standar uji statistik t-test adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi uji $t > \alpha$ (taraf nyata) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi uji $t < \alpha$ (taraf nyata) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

III.4. Uji F Statistik.

Uji-F adalah uji yang menentukan proporsi variabel dependen yang dapat dijelaskan secara bersamaan atau bersama-sama oleh variabel independen. Tes dilakukan bersamaan dengan standar tes berikut:

1. Jika signifikansi uji $F > \alpha$ (taraf nyata) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara bersama sama terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikansi uji $F < \alpha$ (taraf nyata) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

III.5. Uji Multikolinieritas.

Uji Multikolinieritas yaitu situasi dimana terdapat korelasi diantara variabel-variabel independen yang satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan bila nilai koefisien korelasi dari variabel independent mendekati 1 atau sama dengan maka terdapat

korelasi sempurna atau disebut (*perfect multicollinierity*).

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas bisa dengan membandingkan nilai pada *coefficient* yaitu jika nilai *collinearity tolerance* < 1 dan nilai VIF > 10 maka terjadi Multikolinieritas dan sebaliknya jika nilai *collinearity tolerance* > 1 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

III.6. Uji Autokorelasi.

Autokorelasi yaitu pelanggaran asumsi non-autokorelasi, yang disebabkan oleh adanya korelasi antar gangguan atau error pada setiap pengamatan. Autokorelasi pun dapat dikatakan kesalahan dari gangguan periode tertentu berkorelasi dengan gangguan atau error dari periode sebelumnya.

Masalah autokorelasi hanya relevan digunakan jika data yang digunakan yaitu data *time series*. Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dasar pengambilan keputusan yaitu :

1. Jika Durbin Watson (dW) $< DL$ atau $dW > (4-dU)$. Maka terdapat autokorelasi.
2. Jika $dU < dW < (4-dU)$ maka tidak terdapat Autokorelasi.
3. Jika $dL < dW < dU$ Maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti.
4. Nilai dU dan dL diatas didapatkan dari tabel distribusi Nilai Durbin Watson.

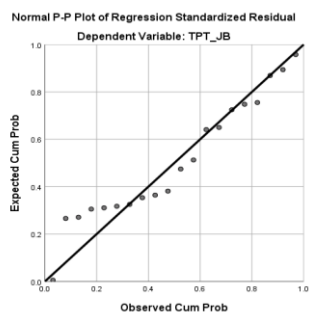
III.7. Koefisien Determinasi R^2 .

R^2 adalah nilai yang menunjukkan sejauh mana variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. R^2 juga dikenal sebagai koefisien determinasi, menjelaskan seberapa besar pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan dan belanja modal terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat Tahun 2002-2021 yang didapat dari laporan tahunan Badan Pusat Statistik Indonesia.



Grafik 1. Hasil Uji Normalitas *Output SPSS*

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa data berdistribusi normal, ini dapat dilihat dari penyebaran datanya yang merata.

IV.1. Estimasi Model Regresi.

Adapun perolehan analisis dan bentuk persamaan regresinya sebagai berikut:

Tabel 1. *Output SPSS*

Model	B
(Constant)	2.441
IPM_1	-.019
MSK_JB	.793
BM_JB	-.034

$$TPT = 2.441 - 0.019IPM + 0.793MSK - 0.034BM$$

Dari tabel 1 di atas menunjukkan hasil output SPSS bahwa:

1. Nilai konstanta persamaan regresi sebesar 2.441, Artinya ketika Variabel Indeks pembangunan manusia, kemiskinan dan belanja modal diabaikan atau bernilai konstan maka akan menaikkan Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2.441 pada taraf nyata 5%.
2. Nilai koefisien indeks Pembangunan Manusia (X1) sebesar -0.019 yang artinya ketika terjadi peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia sebanyak satu persen maka jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat berkurang sebesar 0,019 pada taraf nyata 5%.
3. Nilai Koefisien Tingkat kemiskinan (X2) = 0.739. Artinya jika Tingkat Kemiskinan terjadi peningkatan sebanyak satu persen, maka jumlah Pengangguran Terbuka di Jawa Barat bertambah sebesar 0.739 pada taraf nyata 5%.
4. Nilai Koefisien Belanja Modal (X3) = -0.034. Artinya jika belanja modal terjadi peningkatan sebanyak satu persen, maka jumlah tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat berkurang sebesar 0.034 pada taraf nyata 5%.

IV.2. Hasil Uji t.

Tabel 2. Tabel Hasil Uji t *Output SPSS*

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	.506	.045
	IPM_1	-.974	.759
	MSK_JB	2.176	.045
	BM_JB	-.313	.759

Dari tabel 2 di atas menunjukkan hasil output SPSS bahwa:

1. Hasil Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah Indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan secara individu terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat. Hasilnya adalah Sig 0.759 > α 0.05 yang berarti Investasi tidak berpengaruh signifikan secara Individu terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur pada taraf nyata 5%.
2. Hasil Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan secara individu terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat. Hasilnya adalah Sig 0.045 < α 0.05 yang berarti tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan secara Individu terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada taraf nyata 5%.
3. Hasil Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah tingkat belanja modal berpengaruh signifikan secara individu terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat. Hasilnya adalah Sig 0.759 > α 0.05 yang berarti tingkat

kemiskinan tidak berpengaruh signifikan secara Individu terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada taraf nyata 5%.

IV.3. Hasil Uji F.

Tabel 3. Tabel Hasil Uji F *Output SPSS*

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	75.586	3	25.195	14.806	.000 ^b
	Residual	27.227	16	1.702		
	Total	102.814	19			
a. Dependent Variable: TPT_JB						
b. Predictors: (Constant), BM_JB, IPM_1, MSK_JB						

Hipotesis:

Ho: Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan dan belanja modal tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap Tingkat pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat.

Ha: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan dan belanja modal berpengaruh secara bersama sama terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Oleh karena Sig 0.000 < α 0.05 (5%) maka Ho Ditolak dan Ha diterima. Artinya Variabel IPM, Kemiskinan, dan Belanja Modal berpengaruh secara bersama sama terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat.

IV.4. Uji Multikolinieritas.

Tabel 4. Tabel Hasil Uji F *Output SPSS*

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	IPM_1	.947	1.056
	MSK_JB	.131	7.629
	BM_JB	.133	7.517

Hasil uji multikolinieritas dari tabel diatas menunjukkan bahwa:

1. Nilai Tolerance dari Variabel IPM yaitu: $0.947 > 0.1$ dan nilai VIF dari Variabel IPM yaitu $1.056 < 10.0$.
2. Nilai tolerance dari MSK yaitu: $0.131 > 0.1$ dan nilai VIF dari variable MSK yaitu $7.629 < 10.0$.
3. Nilai tolerance dari BM yaitu: $0.133 > 0.1$ dan nilai VIF dari variable BM yaitu $7.517 < 10.0$.
4. Artinya Variabel IPM, Tingkat Kemiskinan, dan Belanja Modal tidak terjadi Multikolinieritas.

IV.5. Hasil Uji Autokorelasi.

Tabel 5. Tabel Hasil Uji Autokorelasi *Output SPSS*

Mo del	R	R Squ are	Adju sted R Squa re	R Squ are Cha nge	Sig. F Cha nge	Dur bin Wat son Test
1	.857 ^a	.735	.686	.735	.000	1.705

Berdasarkan tabel hasil uji korelasi diatas menunjukkan bahwa Durbin Watson sebesar 1.705 nilai dL sebesar 1.100 dan nilai dU sebesar 1.537 yang didapatkan dari tabel distribusi Nilai Durbin Watson. Maka $dU = 1.537 < dW = 1.722 < (4-dU = 2.463)$ maka tidak terdapat Autokorelasi pada data tersebut.

IV.6. Hasil Koefisien Determinasi R².

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai koefisien R square sebesar 0.686 menunjukkan bahwa variabel independen yaitu IPM, kemiskinan dan belanja modal mampu menjelaskan atau mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat sebesar 68,6% dan sisanya 31,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

IV.7. Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian yang didapatkan pada nilai regresi ini menunjukkan variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada taraf nyata 5%. Koefisien Indeks Pembangunan Manusia bernilai negatif sebesar -0.019 . Artinya jika terjadi kenaikan 1% pada Indeks Pembangunan Manusia maka akan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.019 pada taraf nyata 5%.

Menurut Hukum Okun (Okun's Law) bahwa melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan

kerja dan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap di pasar para pencari kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan jumlah pengangguran.

Hukum Okun (Okun's law) sejalan dengan hasil penelitian Burhanudin (Marhoji dan Nurkhasanah, 2019:57) indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi IPM di suatu wilayah maka tingkat pengangguran akan semakin rendah dan sebaliknya jika IPM rendah maka berpengaruh pada tingginya tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

IV.8. Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian yang didapatkan pada regresi ini menunjukkan bahwa variabel Kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada taraf nyata 5%. Koefisien Tingkat Kemiskinan bernilai positif sebesar 0.793. Artinya jika terjadi kenaikan 1% pada Tingkat kemiskinan maka akan meningkatkan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.793 pada taraf nyata 5%.

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai kondisi manusia yang sedang mengalami kekurangan dalam finansial, memiliki penghasilan yang minim, derajat kesehatan serta pengetahuan rendah, dalam perlakuan secara hukum juga tidak mendapat kelakuan yang adil, memiliki potensi besar dalam mendapatkan ancaman dan tindak kriminalitas, hingga tidak memiliki kuasa

untuk menentukan pilihan hidup secara mandiri.

Hal tersebut memberikan dampak pada meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Riset yang telah dilakukan ini memiliki haluan yang sama dengan pengujian terdahulu yang dilaksanakan oleh Saputra dan Harahap (2018), mereka menyatakan jika pada Provinsi Sumatera Barat tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel TPT/Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah tersebut.

IV.9. Belanja Modal terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian diatas yang didapatkan nilai regresi diatas menunjukkan variabel Belanja Modal (X3 memiliki pengaruh serta dampak negatif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada taraf nyata 5%. Koefisien belanja modal bernilai negatif sebesar 0.034. Artinya jika terjadi kenaikan 1% pada belanja modal maka akan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat sebesar 0.034 pada taraf nyata 5%. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menurunkan angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

IV.10. Perspektif Ekonomi dan Bisnis Islam mengenai Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, dan Belanja Modal terhadap Pengangguran.

Perspektif Ekonomi dan Bisnis Islam menempatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik

absolut seluruh alam semesta. Dalam kerangka itu, maka manusia adalah Khalifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik sebenarnya. Sebagai Khalifah, maka sudah seharusnya manusia menyadari bahwa semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Kemudian atas dasar juga bahwa manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya. Dengan demikian, ketika manusia telah dibangun dan terbangun dalam bukti yang ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, maka manusia harus memberikan kiprah terbaiknya.

Kiprah terbaik yang berhubungan dengan penelitian ini ditunjukkan dengan prinsip bahwa kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun, dengan demikian, kemiskinan akan dipengaruhi oleh kesejahteraan yang digerakkan ke semua hal. Begitu pun belanja modal akan ikut tergerak seiring dengan pergerakan kekayaan dan kesejahteraan yang memengaruhi kemiskinan. Tentunya pengaruh tersebut ialah pengaruh yang mengurangi atau penurunan kemiskinan.

Manusia dengan kiprah terbaiknya seharusnya mampu menghentikan eksploitasi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan. Bersamaan dengan itu, menerapkan sistem warisan Islam (*Mawârits/Farâidl*) sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu. Bersamaan dengan itu juga menerapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang

banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu.

Dengan berdasarkan hal tersebut di atas, maka kekayaan dan kesejahteraan yang senantiasa bergerak dengan berdasarkan Ekonomi dan Bisnis Islam berpengaruh terhadap penurunan pengangguran seiring berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan bersama-sama terhadap Tingkat pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat.
2. Indeks Pembangunan Manusia memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Artinya semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat, maka Tingkat Pengangguran Terbuka semakin Menurun.
3. Tingkat Kemiskinan berpengaruh Positif serta signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Jawa Barat. Artinya semakin tinggi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, maka Tingkat Pengangguran Terbukanya akan meningkat.
4. Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran terbuka di Jawa Barat. Artinya semakin tinggi Belanja Modal Provinsi Jawa Barat, maka

Tingkat Pengangguran Terbukanya akan menurun.

5. Ketika manusia telah dibangun dan terbangun dalam bukti yang ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, maka manusia harus memberikan kiprah terbaiknya. Kiprah terbaik yang berhubungan dengan penelitian ini ditunjukkan dengan prinsip bahwa kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun, dengan demikian, kemiskinan akan dipengaruhi oleh kesejahteraan yang digerakkan ke semua hal. Begitu pun belanja modal akan ikut bergerak seiring dengan pergerakan kekayaan dan kesejahteraan yang memengaruhi kemiskinan. Kekayaan dan kesejahteraan yang senantiasa bergerak dengan berdasarkan Ekonomi dan Bisnis Islam berpengaruh terhadap penurunan pengangguran seiring berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Dengan berdasarkan hal tersebut di atas, saran yang dapat diberikan ialah:
 1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bekerja maksimal dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, agar Tingkat Pengangguran Terbukanya dapat cepat mengalami penurunan
 2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memaksimalkan anggaran dari pemerintah pusat untuk melakukan belanja modal yang maksimal dan tidak di lebih lebihkan agar dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan menimbulkan efek positif yang signifikan di Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Garnella, R., Wahid, N. A., & Yulindawati, Y. 2020. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Karim, Adiwarmans Azwar. (2019), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Keempat. (Depok: Rajawali Press).
- Mankiw, N. G. 2018. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Palindangan, Jeni, & Bakar, Abu. 2021. Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis Volume 5 Nomor 1 Edisi April 2021*.
- Rahardja, P Mandala M. (2008). *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Saputra, (Marhoji dan Nurkhasanah), 2019. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten" *Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 9 (April, 2019).
- Sukirno S. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi ketiga. 2016, Jakarta: Rajawali Pers.